



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS TENAGA KERJA

RENJA TAHUN 2026



Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Lamongan
Kode Pos 62214 Telp (0322) 316147
E-mail: disnaker@lamongankab.go.id
Website: www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA PD Tahun 2026 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

RENJA PD Tahun 2026 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas ke depan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA PD Tahun 2026 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA PD Tahun 2026.

Sekian dan terima kasih.

Lamongan 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN



M. ZAMRONI, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730707 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD.....	5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD.....	17
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD.....	19
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	20
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	34
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI.....	34
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD.....	36
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	43
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 KAJIAN – KAJIAN PELAKSANAAN.....	56
5.2 RENCANA TINDAK LANJUT.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan. Renja memiliki kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD), dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Selanjutnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2026 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan idiil dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2026 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kabupaten Lamongan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Awal (Renja Ranwal PD) dimaksudkan agar Pola Pembangunan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi dapat dijalankan secara sistematis, teratur, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung sehingga dampak yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir dan diantisipasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Rancangan Awal (Renja Ranwal PD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan.
- 2) Menetapkan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam satu tahun sebagaimana diuraikan dalam RENSTRA PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, yang menjadi Pedoman Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan sehingga hasilnya dapat dicapai dan diukur secara komprehensif dan obyektif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dilaksanakan untuk :

1. Mengetahui realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Mengetahui realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Mengetahui realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah;
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan selama Tahun 2024 dan perkiraan target Tahun 2025.

Pada Tahun 2024 total anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 7.454.074.768 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 7.406.923.690 dan belanja modal sebesar Rp. 47.151.078 yang di alokasikan untuk pelaksanaan 6 (enam) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 6.665.414.351 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 6.623.849351 dan belanja modal sebesar Rp 41.565.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 89,42%.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2025 kami perkirakan bahwa pelaksanaan bahwa pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2025 belum dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2025 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2 07 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Disnaker	83	87,61	81	87,63	108,19%	82	87,63	105,58%
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	110 dokumen	8 dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	100%	22 Dokumen	52 Dokumen	47,27%
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12 dokumen	-
2 07 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	-
2 07 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	33 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	33 orang	-
2 07 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	6 laporan	-
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	6 laporan	-
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 07 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	58 orang	-	-	-	-	58 orang	-
2 07 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	-	-	25 orang	25 orang	100%	25 orang	50 orang	-
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	18 paket	17 paket	17 paket	100%	17 paket	52 paket	-
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	27 paket	25 paket	25 paket	100%	25 paket	77 paket	-
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	-	5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	15 paket	-
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	-
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	80 laporan	20 laporan	18 laporan	90%	20 laporan	118 laporan	-
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 07 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	10 unit	5 unit	5 unit	100%	2 unit	17 unit	-
2 07 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	4 unit	2 unit	2 unit	100%	3 unit	9 unit	-
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	9 laporan	-
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	75 laporan	60 laporan	53 laporan	88,33%	60 laporan	188 laporan	-
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	14 laporan	-
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	-
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	-	12 unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	-
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	3 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2 07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	88,90%	88,89%	88,88%	87,70%	98,67%	88,89%	88,89%	99,99%
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro	-	25 orang	-	-	-	-	25 perusahaan	-
2 07 02 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-	-	25 orang	25 orang	100%	25 orang	50 orang	-
2 07 03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,39%	2,50%	1,37%	3,17%	231,39%	1,38%	3,17%	228,06%
		Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	48,372%	39,35%	45,60%	BPS belum rilis	-	46,96%	39,35%	81,35%
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berdasarkan unit kompetensi	224 orang	208 orang	224 orang	288 orang	128,57%	224 orang	720 orang	321,43%
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	-	208 orang	160 orang	160 orang	100%	160 orang	528 orang	-
2 07 03 2.01 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	-	1 unit	3 unit	3 unit	100%	2 unit	6 unit	-
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi	45 LPK	-	45 LPK	2 LPK	4,44%	45 LPK	47 LPK	104,44%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian/Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	-	64 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	100%	31 Lembaga	654 Lembaga	-
2 07 03 2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	10 orang	10 Perusahaan	10 orang	10 orang	100%	10 orang	30 Perusahaan	300%
2 07 03 2.04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	100%	10 Perusahaan	30 Perusahaan	-
2 07 03 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	7 perusahaan kecil	16 perusahaan kecil	7 perusahaan kecil	7 perusahaan kecil	100%	7 perusahaan kecil	30 perusahaan kecil	428,57%
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	16 perusahaan kecil	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	16 perusahaan kecil, 1 dokumen	-
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	76,08%	74,51%	74,05%	75,15%	101,49%	75,05%	75,15%	98,78%
2 07 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Antarkerja	2 pelayanan	1 Pelayanan	2 pelayanan	2 pelayanan	100%	2 pelayanan	2 Pelayanan	100%
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	-	1.557 Orang	75 Orang	3.405 Orang	4.540%	75 Orang	5.037 Orang	-
2 07 04 2.01 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	-	26 Orang	15 Orang	41 Orang	273,33%	15 Orang	82 Orang	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	-	20 orang	20 orang	20 orang	100%	20 orang	60 orang	-
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	1.000 pencaker	3.885 pencaker	1.000 pencaker	2.459 pencaker	245,90%	1.000 pencaker	7.344 pencaker	734,40%
2 07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	2 paket	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 paket, 1 dokumen	-
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-	-	25 orang	25 orang	100%	25 orang	50 orang	-
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	-	1.630 orang	1.000 orang	1.179 orang	117,90%	1.000 orang	3.809 orang	-
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	110 orang	1.413 orang	110 orang	534 orang	485,45%	110 orang	2.057 orang	1,870%
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	-	55 orang	20 orang	20 orang	100%	20 orang	95 orang	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2 07 04 2.04 02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	-	1.338 Orang	20 Orang	493 Orang	2.465%	20 Orang	1.851 Orang	-
2 07 04 2.04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	60 Orang	-
2 07 04 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	50 orang	41 Orang	-	-	-	-	91 Orang	182%
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kabupaten Lamongan	-	41 orang	-	-	-	-	41 orang	-
2 07 05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	60,11%	65,59%	60,09%	65,65%	109,25%	60,10%	65,65%	109,22%
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	30 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	100%	30 perusahaan	90 perusahaan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	-	30 perusahaan	-	-	-	-	30 perusahaan	-
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	50 laporan	50 laporan	50 laporan	100%	1 laporan	101 laporan	-
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	10 perselisihan	8 perselisihan kerja	10 perselisihan kerja	4 perselisihan kerja	40%	10 perselisihan kerja	22 perselisihan kerja	220%
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	-	8 Perkara	-	-	-	-	8 Perkara	-
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	-	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	3 lembaga	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025 Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD S/D Dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 5+7+9 *	11= 10/4 *
3 32 03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,76%	67,19%	64,74%	67,19%	103,78%	64,75%	67,19%	103,75%
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	10 KK	5 KK	10 KK	-	-	10 KK	15 KK	150%
3 32 03 2.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	-	5 KK	5 KK	-	-	5 KK		-
3 32 03 2.01 05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	-	-	20 KK	20 KK	100%	20 KK	40 KK	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lamongan

No	INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasional	IKK PP-6/08	TARGET RENSTRA OPD				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentasi Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja			88,87%	88,88%	88,89%	88,90%	88,89%	87,80%	88,89%	88,90%	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			1,36%	1,37%	1,38%	1,39%	2,50%	3,09%	1,38%	1,39%	
3	Persentase Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja			44,267%	45,595%	46,963%	48,372%	39,35%	BPS belum rilis	46,963%	48,372%	
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten			73,21%	74,05%	75,05%	76,08%	74,52%	75,15%	75,05%	76,08%	
5	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan			60,08%	60,09%	60,10%	60,11%	65,59%	65,65%	60,10%	60,11%	
6	Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya			64,73%	64,74%	64,75%	64,76%	67,19%	64,74%	64,75%	64,76%	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat			80	81	82	83	87,61	87,63	82	83	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut diambil untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan di atas, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja;
2. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di pasar kerja;
3. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal;
4. Pemberangkatan calon transmigran tidak optimal/sering tertunda keberangkatannya dan terbatasnya alokasi;
5. Banyaknya warga Lamongan yang menjadi PMI dan mendapat masalah di Negara tempat bekerjanya;
6. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja;
7. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja;
8. Perlindungan tenaga kerja melalui Program BPJS Ketenagakerjaan belum optimal.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang telah disusun oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2026 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan. Berikut merupakan tabel penjelasannya.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	5.787.148.922	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	100%	5.787.148.922	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Yang Selaras dan Berkualitas	100%				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Yang Selaras dan Berkualitas	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	12 Dokumen	28.571.500	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	12 Dokumen	28.571.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.420.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.420.000	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	4 Laporan	7.823.900	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	4 Laporan	7.823.900	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.327.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.327.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	2 Laporan	4.747.730.420	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	2 Laporan	4.747.730.420	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	30 Orang	4.727.730.420	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	30 Orang	4.727.730.420	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	3 Laporan	10.000.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	3 Laporan	10.000.000	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	3 Laporan	10.000.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	3 Laporan	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	12 Laporan	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	12 Laporan	15.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65 Paket	15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65 Paket	15.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	25 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	25 Orang	-	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Persediaan Barang Dan Jasa Yang Tepat Waktu	16 Laporan	63.755.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Persediaan Barang Dan Jasa Yang Tepat Waktu	16 Laporan	63.755.400	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	17 Paket	13.426.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	17 Paket	13.426.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	25 Paket	15.284.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	25 Paket	15.284.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	5 Paket	4.505.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	5 Paket	4.505.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	2 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	2 Dokumen	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	20 Laporan	15.540.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	20 Laporan	15.540.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	12.443.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	12.443.600	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Unit	4.329.200	Pengadaan Mebel	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Unit	4.329.200	
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	3 Unit	8.114.400	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	3 Unit	8.114.400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	810.637.302	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	810.637.302	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	3 Laporan	306.215.090	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	3 Laporan	306.215.090	
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	55 Laporan	22.902.000	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	55 Laporan	22.902.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	14 Laporan	481.520.212	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	14 Laporan	481.520.212	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	109.010.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	109.010.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	57.646.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	57.646.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya Dan Perizinannya	14 Unit	17.877.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya Dan Perizinannya	14 Unit	17.877.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33.486.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33.486.600	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Rencana Tenaga Kerja	100%	7.380.100	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Rencana Tenaga Kerja	100%	7.380.100	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (Rtk)	1 Dokumen	7.380.100	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (Rtk)	1 Dokumen	7.380.100	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	-	
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Lamongan	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun Rtk Mikro	25 Orang	7.380.100	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Lamongan	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun Rtk Mikro	25 Orang	7.380.100	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,28%	1.041.738.200	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,28%	1.041.738.200	
		Kab. Lamongan	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	41.871,49			Kab. Lamongan	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	41.871,49		
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah Lulusan Pelatihan Yang Bersertifikat Kompetensi	160 Orang	1.006.691.000	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah Lulusan Pelatihan Yang Bersertifikat Kompetensi	160 Orang	1.006.691.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun N	160 Orang	1.000.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun N	160 Orang	1.000.000.000	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 Unit	6.691.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 Unit	6.691.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Terakreditasi	3 LPK	8.030.200	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Terakreditasi	3 LPK	8.030.200	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	84 Lembaga	8.030.200	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Lamongan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	84 Lembaga	8.030.200	
	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Kab. Lamongan	Jumlah Produktivitas Sdm Perusahaan Yang Meningkatkan	10 Orang	11.883.000	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Kab. Lamongan	Jumlah Produktivitas Sdm Perusahaan Yang Meningkatkan	10 Orang	11.883.000	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	11.883.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	11.883.000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	7 Perusahaan Kecil	15.134.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	7 Perusahaan Kecil	15.134.000	
	Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja Di Tingkat Daerah	1 Dokumen	15.134.000	Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja Di Tingkat Daerah	1 Dokumen	15.134.000	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	76,20%	255.997.500	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	76,20%	255.997.500	
	Pelayanan Antarkerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	2 Pelayanan	38.242.700	Pelayanan Antarkerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	2 Pelayanan	38.242.700	
	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Layanan Akad Dan AKL	1.853 Orang	16.768.100	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Layanan Akad Dan AKL	1.853 Orang	16.768.100	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas Yang Mendapatkan Fasilitas Layanan Uld	15 Orang	10.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas Yang Mendapatkan Fasilitas Layanan Uld	15 Orang	10.000.000	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	11.474.600	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	11.474.600	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja	2.464 Pencaker	117.754.800	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja	2.464 Pencaker	117.754.800	
	Pemeliharaan Dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Data Dan Informasi Yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	50.000.000	Pemeliharaan Dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Data Dan Informasi Yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	50.000.000	
	Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari Dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	25 Orang	17.754.800	Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari Dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	25 Orang	17.754.800	
	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	1.179 Orang	50.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Lamongan	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	1.179 Orang	50.000.000	
	Pelindungan Pmi (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI Dan PMI Purna Yang Dilindungi	545 Orang	100.000.000	Pelindungan Pmi (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI Dan PMI Purna Yang Dilindungi	545 Orang	100.000.000	
	Peningkatan Pelindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI/PMI Yang Dilindungi Dan Ditingkatkan Kompetensinya	22 Orang	32.000.000	Peningkatan Pelindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI/PMI Yang Dilindungi Dan Ditingkatkan Kompetensinya	22 Orang	32.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI Yang Terlayani Sesuai Prosedur Dalam Ltsa Dan Pmi Bermasalah Yang Ditangani	500 Orang	36.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Kab. Lamongan	Jumlah CPMI Yang Terlayani Sesuai Prosedur Dalam Ltsa Dan Pmi Bermasalah Yang Ditangani	500 Orang	36.000.000	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Lamongan	Jumlah Pmi Purna Yang Diberdayakan	22 Orang	32.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Lamongan	Jumlah Pmi Purna Yang Diberdayakan	22 Orang	32.000.000	
	Penerbitan Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Tka Yang Memperpanjang RPTKA	45 Orang	-	Penerbitan Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Tka Yang Memperpanjang RPTKA	45 Orang	-	
	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) Untuk Pengesahan Rptka Perpanjangan Bagi Tka Yang Bekerja Di Lokasi Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) Untuk Pengesahan Rptka Perpanjangan Bagi Tka Yang Bekerja Di Lokasi Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Yang Divalidasi	45 SKRD	-	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) Untuk Pengesahan Rptka Perpanjangan Bagi Tka Yang Bekerja Di Lokasi Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) Untuk Pengesahan Rptka Perpanjangan Bagi Tka Yang Bekerja Di Lokasi Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Yang Divalidasi	45 SKRD	-	
	Program Hubungan Industrial	Kab. Lamongan	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	96,15%	2.879.271.600	Program Hubungan Industrial	Kab. Lamongan	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	96,15%	2.879.271.600	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30 Perusahaan	53.235.200	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30 Perusahaan	53.235.200	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Pengesahan Peraturanperusahaan Yang Terkait Dengan Hubungan Industrial Dan Terdaftar Di WLKP Online	30 Perusahaan	10.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Pengesahan Peraturanperusahaan Yang Terkait Dengan Hubungan Industrial Dan Terdaftar Di WLKP Online	30 Perusahaan	10.000.000	
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	-	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Kab. Lamongan	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	-	
	Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Kab. Lamongan	Jumlah Data Dan Informasi Sarana Hi (PP/PKB), Struktur Skala Upah Dan LKS Bipartit) Dan Pekerja Yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek Serta Pengupahan	1 Laporan	43.235.200	Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Kab. Lamongan	Jumlah Data Dan Informasi Sarana Hi (PP/PKB), Struktur Skala Upah Dan LKS Bipartit) Dan Pekerja Yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek Serta Pengupahan	1 Laporan	43.235.200	
	Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dicegah Dan Diselesaikan	100%	2.826.036.400	Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dicegah Dan Diselesaikan	100%	2.826.036.400	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perselisihan Yang Dicegah	4 Perkara	-	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perselisihan Yang Dicegah	4 Perkara	-	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perkara Perselisihan Yang terselesaikan	4 Perkara	-	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perkara Perselisihan Yang terselesaikan	4 Perkara	-	
	Penyelenggaraan Verifikasi Dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi Dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikatburuh Serta Non Afiliasi	Kab. Lamongan	Jumlah Asosiasi Pengusaha Dan Serikat Pekerja Yang Diverifikasi	35 Asosiasi Dan Serikat Pekerja	-	Penyelenggaraan Verifikasi Dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi Dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikatburuh Serta Non Afiliasi	Kab. Lamongan	Jumlah Asosiasi Pengusaha Dan Serikat Pekerja Yang Diverifikasi	35 Asosiasi Dan Serikat Pekerja	-	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Lks Tripartit Yang Dibina	1 Lembaga	-	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Lks Tripartit Yang Dibina	1 Lembaga	-	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Lamongan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	26.173 Orang	2.826.036.400	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Lamongan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	26.173 Orang	2.826.036.400	
	Urusan Pemerintahan Pilihan					Urusan Pemerintahan Pilihan					
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya	67,50%	25.030.600	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya	67,50%	25.030.600	
	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Calon Transmigran Yang Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	25.030.600	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Calon Transmigran Yang Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	25.030.600	
	Pemindahan Dan Penempatan Transmigran Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Transmigran Yang Dipindahkan Dan Ditempatkan	5 Kk	-	Pemindahan Dan Penempatan Transmigran Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Transmigran Yang Dipindahkan Dan Ditempatkan	5 Kk	-	
	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Jumlah Calon Transmigran Yang Mendapatkan Penyuluhan	20 Kk	-	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Jumlah Calon Transmigran Yang Mendapatkan Penyuluhan	20 Kk	-	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Kab. Lamongan	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal Yang Mendapatkan Penyuluhan	20 Orang	7.729.600	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Kab. Lamongan	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal Yang Mendapatkan Penyuluhan	20 Orang	7.729.600	
	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Kab. Lamongan	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilaksanakan Monitoring Dan Evaluasi	1 Lokasi	17.301.000	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Kab. Lamongan	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilaksanakan Monitoring Dan Evaluasi	1 Lokasi	17.301.000	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Persentase Transmigran Yang Dibina Dan Diberdayakan	100%	20.000.000	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Lamongan	Persentase Transmigran Yang Dibina Dan Diberdayakan	100%	20.000.000	
	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Kab. Lamongan	Jumlah Transmigran Yang Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	20.000.000	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Kab. Lamongan	Jumlah Transmigran Yang Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	20.000.000	
	Penguatan Sdm Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Lamongan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang Dibina	5 Kepala Keluarga	20.000.000	Penguatan Sdm Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Lamongan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang Dibina	5 Kepala Keluarga	20.000.000	
	Jumlah				10.016.566.922	Jumlah				10.016.566.922	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari para Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Sekretariat.

Dinas Tenaga Kerja sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Akan tetapi dalam Renja ini tidak ada program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

Tabel T-C. 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KABUPATEN LAMONGAN

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL		NIHIL		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
Nasional			
1.	Mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional	Kemennaker	
2.	Membangun Integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja	Kemennaker	
3.	Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan	Kemennaker	
4.	Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal	Kemennaker	
5.	Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan	Kemennaker	
Provinsi			
1.	Optimalisasi Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi beserta Uji Sertifikasi Kompetensi	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	
2.	Menyesuaikan jurusan di BLK dengan metode Eliminate, Reduce, Raise dan Create secara bertahap dan berkelanjutan agar bisa sesuai dengan perkembangan Industri maupun perkembangan teknologi industri bukan hanya pada situasi sekarang serta memprediksi perkembangan teknologi di masa depan.	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	

3.	Link and match antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi angkatan kerja melalui Bursa Kerja Serta Optimalisasi datasebaran sektor lapangan usaha yang akan berkembang di daerah wilayah Kabupaten Lamongan Serta data analisa jabatan tentang pekerjaan yang terdestrupsi akibat globalisasi Transformasi digital serta distrupsi di pasar kerja (rev. industri 4.0).	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	
4.	Pengukuran pertumbuhan produktivitas perusahaan menengah dan wirausaha baru	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	
5.	Peningkatan taraf ekonomi transmigran di daerah penempatan dengan cara penambahan skill baru pada waktu pelatihan pra	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	

Strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan misi pertama (I) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk “ **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan**”. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien.

Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 tahun. Perumusan strategi didasarkan pada kriteria:

- 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;

- 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini.

Visi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan keselarasan dan harmonisasi dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, RPJPD Tahun 2025-2045 dan RTRW Tahun 2020-2039 serta mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Lamongan maka Visi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yakni:

“Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”

Visi "Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan" mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, serta dikenal luas dalam berbagai bidang, terutama sosial dan ekonomi. Kejayaan diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Capaian tersebut diiringi oleh penyediaan layanan publik yang profesional dan responsif, sehingga masyarakat Kabupaten Lamongan tidak hanya merasakan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik secara lahir dan batin.

Sementara itu, prinsip berkelanjutan dalam visi ini menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, “**Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan**” ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut.

Misi 1

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan

Misi 2

Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman

Misi 3

Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan

Misi 4

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ditengah Kehidupan Masyarakat yang Religius, Harmoni, Berbudaya dan Partisipatif Dalam Pembangunan

Misi 5

Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan
Tujuan : Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang Tenaga Kerja mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Pelayanan Internal yang**

Tersedia dengan Baik, Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Yang Selaras dan Berkualitas.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu Rencana Tenaga Kerja.**
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, tingkat produktifitas tenaga kerja.**
4. Program Penempatan Tenaga Kerja; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota.**
5. Program Hubungan Industrial; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).**
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya.**
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan.**

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2025-2029) dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka pada Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan merencanakan 7 (Tujuh) Program yang berkaitan dengan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Dari Program tersebut diimplikasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - 1.1.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
 - 1.1.2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 1.1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 1.1.1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi
 - 1.1.2. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
 - 1.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 1.2.1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 1.3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - 1.3.1. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
 - 1.4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4.1. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Pelayanan Antar Kerja
 - 1.1.2. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - 1.1.3. Perluasan Kesempatan Kerja
 - 1.2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 1.2.1. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - 1.2.2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - 1.2.3. Job Fair/Bursa Kerja
 - 1.3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3.1. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)

- 1.3.2. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
 - 1.3.3. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan
5. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - 1.1.2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
 - 1.1.3. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - 1.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.2.2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/SerikatBuruh serta Non Afiliasi
 - 1.2.4. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.5. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1.1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.1.1. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.1.2. Penyuluhan Transmigrasi
 - 1.1.3. Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal
 - 1.1.4. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi

7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
 - 1.1.1. Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2026 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Lamongan

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Internal yang Tersedia dengan Baik	Dinas Tenaga Kerja	100%	5.777.148.922			100%	6.354.863.814
						Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan, Evaluasi Yang Selaras dan Berkualitas		100%				100%	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Dinas Tenaga Kerja	12 Dokumen	28.571.500			12 Dokumen	31.428.650
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	4 dokumen	6.420.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		4 dokumen	7.062.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF				
										1	2	3	4
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja	4 laporan	7.823.900	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		4 laporan	8.606.290
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Tenaga Kerja	4 laporan	14.327.600	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		4 laporan	15.760.360
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Dinas Tenaga Kerja	2 Laporan	4.747.730.420			2 Laporan	5.222.503.462
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja	30 orang	4.727.730.420	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan & DAU		30 orang	5.200.503.462
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Tenaga Kerja	3 laporan	10.000.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		3 laporan	11.000.000
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Dinas Tenaga Kerja	3 laporan	10.000.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		3 laporan	11.000.000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	5.000.000			12 Laporan	5.500.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Tenaga Kerja	65 paket	5.000.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		65 paket	5.500.000
2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Dinas Tenaga Kerja	25 Orang	-			25 Orang	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang Dan Jasa Yang Tepat Waktu	Dinas Tenaga Kerja	16 Laporan	63.755.400			16 Laporan	70.130.940
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	17 paket	13.426.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		17 paket	14.768.600
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	25 paket	15.284.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		25 paket	16.812.400
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	5 paket	4.505.400	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		5 paket	4.955.940
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja	2 dokumen	15.000.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2 dokumen	16.500.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Tenaga Kerja	20 laporan	15.540.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		20 laporan	17.094.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamongan	1 Laporan	12.443.600			1 Laporan	13.687.960
2 07 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Lamongan	2 unit	4.329.200	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2 unit	4.762.120
2 07 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Lamongan	3 unit	8.114.400	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		3 unit	8.925.840
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	12 Laporan	810.637.302			12 Laporan	891.701.032
2 07 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Lamongan	3 laporan	306.215.090	Pajak Kendaraan Bermotor		3 laporan	336.836.599
2 07 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Lamongan	55 laporan	22.902.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		55 laporan	25.192.200
2 07 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Lamongan	14 laporan	481.520.212	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		14 laporan	529.672.233
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamongan	4 Laporan	109.010.700			4 Laporan	119.911.770

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Lamongan	2 unit	57.646.500	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		2 unit	63.411.150
2 07 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Kab. Lamongan	14 unit	17.877.600	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		14 unit	19.665.360
2 07 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Lamongan	1 unit	33.486.600	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		1 unit	36.835.260
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu Rencana Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	100%	7.380.100			100%	8.118.110
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Lamongan	1 dokumen	7.380.100			1 dokumen	8.118.110
2 07 02 2.01 0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Lamongan	1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
2 07 02 2.01 0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Kab. Lamongan	25 orang	7.380.100	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		25 orang	8.118.110
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Kab. Lamongan	3,28%	1.041.738.200			3,35%	1.145.912.020
		Tingkat produktifitas tenaga kerja	Kab. Lamongan	41.871 Juta Rp/Tenaga Kerja				42.651 Juta Rp/Tenaga Kerja	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 7 3 2,01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	Kab. Lamongan	160 orang	1.006.691.000			160 orang	1.107.360.100
2 07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Kab. Lamongan	160 orang	1.000.000.000	DBH CHT		160 orang	1.100.000.000
2 07 03 2.01 0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	Kab. Lamongan	2 unit	6.691.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2 unit	7.360.100
2 7 3 2,02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi	Kab. Lamongan	3 LPK	8.030.200			4 LPK	8.833.220
2 07 03 2.02 0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Kab. Lamongan	84 Lembaga	8.030.200	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		84 Lembaga	8.833.220
2 7 3 2,04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	Kab. Lamongan	10 Orang	11.883.000			10 Orang	13.071.300
2 07 03 2.04 0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab. Lamongan	10 Perusahaan	11.883.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		10 Perusahaan	13.071.300
2 07 03 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Kab. Lamongan	7 perusahaan kecil	15.134.000			7 perusahaan kecil	16.647.400

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 03 2.05 0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab. Lamongan	1 Dokumen	15.134.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		1 Dokumen	16.647.400
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	76,20%	237.997.500			76,25%	261.797.250
2 7 4 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	Kab. Lamongan	2 Pelayanan	38.242.700			2 Pelayanan	42.066.970
2 07 04 2.01 0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Lamongan	1.853 Orang	16.768.100	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		1.860 Orang	18.444.910
2 07 04 2.01 0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Kab. Lamongan	15 Orang	10.000.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		15 Orang	11.000.000
2 07 04 2.01 0005	Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Kab. Lamongan	20 orang	11.474.600	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		20 orang	12.622.060
2 7 4 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	Kab. Lamongan	2.464 Pencaker	117.754.800			2.474 Pencaker	129.530.280
2 07 04 2.03 0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lamongan	1 dokumen	50.000.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		1 dokumen	55.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 04 2.03 0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Lamongan	25 orang	17.754.800	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		25 orang	19.530.280
2 07 04 2.03 0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Kab. Lamongan	1.179 Orang	50.000.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		1.179 Orang	55.000.000
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	Kab. Lamongan	545 Orang	82.000.000			554 Orang	90.200.000
2 07 04 2.04 0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Kab. Lamongan	22 Orang	32.000.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		24 Orang	35.200.000
2 07 04 2.04 0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	Kab. Lamongan	500 Orang	30.000.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		505 Orang	33.000.000
2 07 04 2.04 0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	Kab. Lamongan	22 Orang	20.000.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		24 Orang	22.000.000
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Kab. Lamongan	96,15%	2.879.271.600			96,17%	3.167.198.760

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Kab. Lamongan	30 Perusahaan	53.235.200			30 Perusahaan	58.558.720
2 07 05 2.01 0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan PeraturanPerusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Lamongan	30 Perusahaan	10.000.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		30 Perusahaan	11.000.000
2 07 05 2.01 0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Lamongan	10 Perusahaan	-	-		10 Perusahaan	-
2 07 05 2.01 0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Kab. Lamongan	1 laporan	43.235.200	Dana Bagi Hasil DBH		1 laporan	47.558.720
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah dan diselesaikan	Kab. Lamongan	100%	2.826.036.400			100%	3.108.640.040

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Lamongan	4 Perkara	-	-	4 Perkara	-
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kab. Lamongan	4 Perkara	-	-	4 Perkara	-
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/SerikatBuruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Lamongan	35 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	-	35 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Lamongan	1 Lembaga	-	-	1 Lembaga	-
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Lamongan	26.173 Orang	2.826.036.400	DBH CHT	26.173 Orang	3.108.640.040

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3									
3	32								
3	32	03						67,70%	27.533.660
3	32	03	2.01					5 Kepala Keluarga	27.533.660
3	32	03	2.01	0004				5 KK	-
3	32	03	2.01	0005				20 KK	-
3	32	03	2.01	0010				20 orang	8.502.560
3	32	03	2.01	0020				1 Lokasi	19.031.100

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

5.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang mandiri, berdaya saing, harmonis, dan sejahtera. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2026, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya Renja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, masih terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. Fasilitas prasarana dan pelatihan masih belum lengkap
 - b. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta Penciptaan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja belum optimal
 - c. Keberadaan BLK di Lamongan masih belum didukung tenaga pelatih (instruktur) sendiri sehingga masih bekerja sama dengan pihak ketiga (Instruktur LPKS) atau belum mempunyai Instruktur PNS.
 - d. Penyaluran eks peserta pelatihan di BLK ke perusahaan kurang optimal.
 - e. Masih belum maksimalnya LKS Bipartit Perusahaan dalam penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja di perusahaan
2. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang.

Berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, agar di tahun mendatang peningkatan kinerja lebih meningkat lagi capaiannya, guna lebih mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka terhadap program-program yang telah ditetapkan dan dianggarkan khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat (sebagaimana RPJMD 2021 - 2026), disarankan perencanaannya lebih dimantapkan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan lebih memperhatikan alokasi anggaran Ketenagakerjaan dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan mengurangi Kemiskinan.

Lamongan, 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**



M. ZAMRONI, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730707 199303 1 010